

Kode>Nama Rumpun Ilmu* : 601 / Ilmu Sosial dan Politik

**DRAFT LAPORAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



KONSEP KEBANGSAAN DI KALANGAN WONG CILIK

TIM PENGUSUL

Dra. Susanti, M.Si. NIDN. 0014126704

Dra. Mani Festati Broto, M.Ed. NIDN. 0023026002

UNIVERSITAS TERBUKA

MARET 2013

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL

Judul Penelitian : Konsep Kebangsaan Di Kalangan Wong Cilik
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 601 / Ilmu Sosial dan Politik
Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap : Dra. Susanti, M.Si.
b. NIDN : 0014126704
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : S1 Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 08129079436
f. Alamat surel (e-mail) : susanti@ut.ac.id.
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Dra. Mani Festati Broto, M.Ed.
b. NIDN : 0023026002
c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : -
b. NIDN : -
c. Perguruan Tinggi : -
Lama Penelitian Keseluruhan : 1 Tahun
Penelitian Tahun ke : 1 (Pertama)
Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 69.960.000,00
Biaya Tahun Berjalan : Diusulkan ke DIKTI Rp. 69.960.000,00

Tangerang Selatan, 8 Maret 2013

Ketua Peneliti,



(Dra. Susanti, M.Si.)
NIP. 19671214 199303 2 002

Menyelujui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Dra. Dewi A. Padmo Putri, M.A., Ph.D.)
NIP. 19610724 198710 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB 3. METODE PENELITIAN	12
BAB 4. HASIL PENELITIAN	
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	
4.1. Anggaran Biaya.....	
4.2. Jadwal Penelitian	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.....	
Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana	
Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti.....	
Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota	
Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti dan Tim Peneliti.....	

RINGKASAN

Praktek demokrasi di Indonesia menunjukkan fenomena yang sudah di luar batas peraturan yang dicontohkan oleh para elit politik (penguasa), bahkan mengarah ke anarkis dengan medium *wong cilik*. Kekerasan dalam ranah politik semakin tinggi intensitasnya yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya tindakan destruktif. Tindakan destruktif ini sebenarnya mencerminkan fanatisme sempit, ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan hukum yang berlaku, tanpa menyadari bahwa hal tersebut juga merugikan masyarakat itu sendiri dan menunjukkan indikator rendahnya nasionalisme. Nasionalisme dalam masyarakat awam sering diungkapkan dengan penolakan pihak asing, maka konsep kebangsaan pun cenderung dibangun dari sudut pandang luar atau asing. Penelitian ini berusaha menganalisis konstruksi konsep kebangsaan di kalangan wong cilik. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah berupaya menjawab kaitan antara konsep kebangsaan dengan peran serta wong cilik sebagai warganegara. 1) Bagaimana peran warga negara menurut kalangan wong cilik? (2) Bagaimana kewajiban warga negara menurut kalangan wong cilik? dan (3) Bagaimana hak warga negara menurut kalangan wong cilik? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber. Narasumber secara langsung dari sumber asli (*wong cilik*) dan para narasumber/tokoh baik dari kalangan akademisi ataupun praktisi yang dipilih secara *purposive* (30 narasumber). Penelitian ini penting, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memetakan langkah yang harus disiapkan untuk melakukan rekayasa sosial dalam merekonstruksi *civil society* seperti yang diharapkan di Indonesia.

Keywords : Pluralisme, Kebangsaan, dan *Wong Cilik*.

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kisruh politik disinyalir akan memuncak pada masa-masa menjelang pemilihan umum di tahun 2014, hal ini telah diberitakan berbagai media massa beberapa partai politik telah melakukan manuever politik seperti rekrutmen calon-calon legislator, calon presiden dan juga meluncurkan *black kampanye*. Berita politik terbaru adalah penyalahgunaan dana bantuan sosial (Bansos), padahal dana bansos niatnya untuk meringankan beban kehidupan masyarakat lebih tepatnya kaum *wong cilik* (individu atau keluarga) yang terkena musibah bencana alam atau krisis ekonomi serta sosial (Kompas, 20 Februari 2013). Pada kenyataannya, bantuan kepada *wong cilik* melalui dana bansos oleh para penguasa/elit lebih bersifat politis-pragmatis untuk mempertahankan dan memperoleh kekuasaan para penguasa menjelang pilkada. Manuever politik dengan pemanfaatan *wong cilik* oleh penguasa/elit politik sebagai objek politik telah sering dilakukan, terutama menjelang pemilu. Konsep *blusukan* Jokowi-Ahok, dan ditiru oleh politisi lainnya, adalah suatu situasi politik yang memanfaatkan kondisi *wong cilik* yang ada di lingkungannya untuk menunjukkan bahwa tanpa *wong cilik* seorang pemimpin tidak akan diakui secara politik. Singkatnya *wong cilik* merupakan medium mobilisasi massa yang paling sering dimanfaatkan oleh para elit/politisi.

Pengertian *wong cilik* diartikan sebagai kekuatan yang dapat menjadi pilar perjuangan untuk bebas dari kemiskinan, kemelaratan, ketertinggalan, dan ketidakadilan (Soekarno, Frans Magnis-Suseno, Nurcholis Madjid). Manifestasi dari konsep *wong cilik* digagas Soekarno dengan istilah Marhaenisme (kaum marhaen), yaitu kelompok rakyat biasa walaupun miskin dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik tetapi memiliki prinsip-prinsip hidup yang bebas dari tekanan-tekanan penguasa, hidup mandiri dan memiliki moralitas otonom. Soekarno sadar saat menggagas istilah kaum marhaen pertama kali di tahun 1920-an adalah untuk tujuan perjuangan (Soekarno, 1920) yaitu melawan feodalisme, kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme.

Selama 32 tahun rezim Orde Baru, konstruksi masyarakat Indonesia terlalu didominasi oleh elit penguasa (birokrat-teknokrat-militer) dan struktur masyarakat Indonesia pada umumnya dikategorikan sebagai rakyat (*wong cilik*) yang harus dibina dalam melakukan kegiatan partisipasi

politik. Reformasi 1998 bercita-cita mengembangkan demokrasi dan bertujuan melakukan dekonstruksi struktur masyarakat, namun dalam prakteknya kehidupan politik tetap didominasi para penguasa/elit yang senang memberi harapan semu tentang perbaikan penghidupan *wong cilik* untuk kepentingan mereka. Pascareformasi, intensitas mobilisasi politik *wong cilik* akan meningkat yaitu pada waktu-waktu sebelum, dan pada saat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun, sesudah pilkada di beberapa daerah selalu diwarnai konflik elit yang memanfaatkan *wong cilik*, seperti kekacauan antar pendukung penguasa/elit politisi yang seringkali berakhir dengan demonstrasi anarkis. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kehidupan berdemokrasi, baik demokrasi kaum elit maupun *wong cilik*, karena elit politik/penguasa cenderung memanfaatkan ketidakmandirian sosial, ekonomi dan politik *wong cilik*, ketimbang mengembangkan kehidupan demokrasi. Kemampuan menterjemahkan perbedaan demokrasi sebenarnya merupakan modal politik bagi institusi-institusi politik, terutama partai politik dalam melakukan aktivitas politiknya, apalagi bagi wilayah-wilayah yang heterogenitas masyarakatnya tinggi. Apakah istilah *wong cilik*/kaum marhaen masih relevan dibahas pada masa kini? Bagaimana *wong cilik* berperan dalam rekonstruksi kebangsaan Indonesia yang demokratis saat ini?

Sistem sosial yang secara sosiologis pada awalnya dibangun ketika masyarakat kapital membutuhkan pluralisme ekonomi untuk meningkatkan efektifitas produksi dan situasi yang kondusif bagi perkembangan usaha. Situasi ini berimbas pada pluralisme demokrasi untuk menguatkan asumsi hukum dan melegitimasi kepemimpinan yang akomodatif terhadap massa rakyat (*wong cilik*) yang dipimpinnya. Jadi pluralisme demokrasi tidak terbatas pada pengakuan akan sisi luar perbedaan saja, tetapi juga harus dilandasi akan kesadaran atas konsekuensi dari pluralisme tersebut.

Ketika tiga unsur utama bangunan demokrasi pluralisme yaitu: toleransi, kebebasan, dan kompromi terabaikan dalam tatanan sistem sosial, maka makna demokrasi semakin jauh dari otoritas sosial; akibatnya muncul kekacauan publik. Secara teoritis, ada indikasi kuat pemahaman yang menganggap bahwa demokrasi adalah *majoritarianisme* meski kehendak mayoritas belum tentu benar. Pemahaman bahwa demokrasi adalah mayoritas atau yang menomorsatukan suara terbanyak, tetapi cenderung mengabaikan kebebasan sipil semakin nyata. Pernyataan ini cenderung mengabaikan pluralisme, oleh karena itu dalam sistem demokrasi ada kesatuan pandangan menciptakan persamaan hak politik dan kebebasan politik sebagai prinsip yang realistis-ideal.

Prinsip tersebut membuka peluang ruang saluran politik bagi kelompok minoritas. Hak politik tidak hanya dalam bentuk memberikan suara pada momen politik formal dalam Pilpres, Pilkada, dsb. tetapi harus ikut dalam proses regulasi-regulasi politik.

Kenyataan yang ada bahwa partisipasi politik struktural sedikit kuantitasnya dibanding jumlah masyarakat, sehingga kesannya justru minoritas (dalam bentuk struktur) yang kemudian menjelma menjadi mayoritas dan mendominasi masyarakat. Terkait dengan kebebasan politik, seringkali perilaku politiknya juga menghalalkan segala cara dan mencederai demokrasi . Ketika setiap individu dan kelompok kepentingan menyadari adanya kebebasan politik yang dapat diekspresikan dalam bentuk yang berbeda; maka sebenarnya di sinilah titik temunya.

Berkaitan dengan pertanyaan mengapa nasionalisme Indonesia mengalami kesulitan dihadapan massa rakyat (*wong cilik*) dan pemerintahannya sendiri, maka Lay (2006: 175-177) menganalisis sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan pemahaman yang mendalam suatu ideologi. Ideologi dipahami sebatas salah satu dari aliran politik yang pernah ada di Indonesia pada masa lalu.
2. Bertalian dengan praksis nasionalisme yang tampaknya lebih mengikuti logika nasionalisme internal menurut pembedangan Pater Alter (1989) yang memberi penekanan pada superioritas dan keabsolutan negara atas warganya namun mengabaikan substansi dari suatu nasionalisme sebagai suatu pakta perjanjian.
3. Bertalian dengan kenyataan bahwa nasionalisme kadang digunakan sebagai sarana untuk mengabsahkan atau membela sesuatu yang bertentangan dengan logika yang melekat dalam hal ybs.
4. Pada Era Bung Karno, lebih mewajah sebagai kata lain dari “anti modal asing” atau autarki.

Analisis Lay ini relevan bila dikaitkan dengan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat era reformasi. Intensitas partisipasi politik di Indonesia yang meningkat ini dapat dilihat dari kasus-kasus Pilkada di beberapa daerah yang selalu diwarnai oleh kekacauan dan ketidakstabilan masyarakat atau publik. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya wawasan nasionalisme dan sempitnya publik memahami pluralism. Kemampuan menterjemahkan perbedaan demokrasi sebenarnya merupakan modal politik bagi institusi-institusi politik dalam melakukan aktifitas politiknya, apalagi bagi wilayah-wilayah yang heterogenitas masyarakatnya tinggi.

Ketika dinamika politik di tingkal lokal semakin meningkat dan kompleks, sebenarnya hal ini merupakan pelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat (*wong cilik*) bila dilakukan secara

bertanggung jawab oleh setiap warga negara. Dalam hal pembelajaran demokrasi kepada *wong cilik* maka menjadi tanggung jawab para elit politik. Artinya demokrasi setiap *wong cilik* dalam menjalankan demokrasi disandingkan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya secara seimbang sebagai warga negara. Salah satu peran warga negara adalah ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh para pejabat atau lembaga-lembaga negara. ~~Setiap warga negara tentunya dapat menuntut hak dan kewajiban secara bersama atau seimbang. Beberapa kewajiban warga negara Indonesia antara lain~~ (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/peran-warga-negara-sebagai-bangsa-indonesia> diakses 10 Februari 2013, Pk. 12.00).:

- ~~1. wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh;~~
- ~~2. wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda);~~
- ~~3. wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya;~~
- ~~4. wajib taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia; dan~~
- ~~5. wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.~~

Selain kewajiban tersebut di atas, maka warganegara memiliki hak antara lain

~~(<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/peran-warga-negara-sebagai-bangsa-indonesia>, diakses 10 Februari 2013, Pk. 12.00).~~

- ~~1. berhak mendapatkan perlindungan hukum;~~
- ~~2. berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;~~
- ~~3. mendapat kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam~~
~~— pemerintahan;~~
- ~~4. bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipereayai;~~
- ~~5. berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran;~~
- ~~6. berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh; dan~~
- ~~7. memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.~~

Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah praktek demokrasi yang sudah di luar batas peraturan yang dicontohkan oleh para elit politik (penguasa) bahkan mengarah ke anarkis dengan medium *wong cilik* untuk melakukan tindakan-tindakan perusakan-perusakan sarana prasarana

umum. Kekerasan dalam ranah politik semakin tinggi intensitasnya yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya tindakan destruktif oleh masyarakat tanpa menyadari bahwa semua sarana prasarana umum itu dibangun dari pajak atau uang rakyat. Tindakan destruktif ini sebenarnya mencerminkan fanatisme sempit, ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan hukum yang berlaku, tanpa menyadari bahwa hal tersebut juga merugikan masyarakat itu sendiri dan menunjukkan indikator rendahnya nasionalisme.

B. Permasalahan

Intensitas mobilisasi politik *wong cilik* oleh elit akan meningkat tidak saja pada waktu-waktu sebelum, dan pada saat menjelang Pilkada. Namun, sesudah pilkada di beberapa daerah sering diwarnai konflik yang memanfaatkan *wong cilik* oleh elit yang seringkali berakhir dengan demonstrasi anarkis. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kehidupan berdemokrasi, baik demokrasi di kalangan elit politik maupun *wong cilik*, karena elit politik/penguasa cenderung memanfaatkan ketidakmandirian sosial, ekonomi dan politik *wong cilik*, ketimbang mengembangkan kehidupan demokrasi. Kemampuan menterjemahkan demokrasi sebenarnya merupakan modal politik bagi institusi-institusi politik, terutama partai politik dalam melakukan aktivitas politiknya, apalagi bagi wilayah-wilayah yang heterogenitas masyarakatnya tinggi.

Tindakan destruktif ini sebenarnya mencerminkan fanatisme sempit, ketidakpercayaan masyarakat kepada elit/penguasa dan hukum yang berlaku, tanpa menyadari bahwa hal tersebut juga merugikan masyarakat itu sendiri dan menunjukkan indikator rendahnya nasionalisme. Artinya komitmen elit memberdayakan *wong cilik* tidak disemai dengan kesinambungan nilai-nilai kebangsaan. Seringkali, nasionalisme dalam masyarakat awam sering diungkapkan dengan penolakan pihak asing, maka konsep kebangsaan pun cenderung dibangun dari sudut pandang luar atau asing.

C. Tujuan

Penelitian ini berusaha menganalisis konsep kebangsaan di kalangan *wong cilik*. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah berupaya menafsirkan "bagaimana *wong cilik* mengartikan konsep kebangsaan dalam konteks keseharian mereka?"

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebangsaan

Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan UUD 1945 merupakan konsensus nasional dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Indonesia yang disepakati landasan ideologi negara Pancasila, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan disepakati pula bahwa masyarakatnya berada dalam satu ke-Indonesia-an yang terdiri dari berbagai suku/ras/etnis, budaya, agama dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus nasional ini menjadi panduan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Degradasi pada semangat kebangsaan ini dapat terjadi dengan menurunnya kesadaran dan kurangnya penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh tatan kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh globalisasi yang bersifat multidimensional.

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam pasal-pasal UUD NKRI Tahun 1945 adalah nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum. Memasuki masa Reformasi, Indonesia berusaha membangun sistem demokrasi yang secara akademis dan empiris sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana nilai demokrasi yang berlaku di negara maju. Nilai-nilai tersebut oleh Assiddiqi disebut *core values of democracy* yang terdiri dari (<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>), diakses 6 Februari 2013, pk. 13.00):

- 1) Prinsip pemerintahan berdasar konstitusi (baru) yang menjamin *checks and balances* yang sehat.
- 2) Pemilihan umum yang demokratis (*free and fair*), yang pada akhirnya telah mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat.
- 3) Desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab atas dasar sistem otonomi daerah untuk lebih mendekatkan rakyat pada pengambilan keputusan.
- 4) Sistem pembuatan undang-undang yang demokratis, aspiratif dan terbuka prosesnya.
- 5) Sistem peradilan yang independen, yang bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun datangnya.
- 6) Pembatasan kekuasaan kepresidenan atas dasar konstitusi.
- 7) Peran media yang bebas sebagai sarana kontrol sosial.
- 8) Jaminan terhadap peran kelompok-kelompok kepentingan (*civil society*).
- 9) Hak masyarakat untuk tahu.
- 10) Promosi dan perlindungan HAM, termasuk perlindungan hak-hak minoritas karena beda agama, ras, atau etnis.
- 11) Kontrol sipil terhadap militer.

Lebih lanjut Assiddiqi juga memberikan contoh-contoh implementasi dari nilai demokrasi tersebut. Sedangkan nilai kebersamaan dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Bersifat internal, manakalah rasa kebersamaan antara sesama anak bangsa mulai berkurang, seperti memelihara persamaan dalam perbedaan dan memelihara perbedaan dalam persamaan; dan bersifat eksternal apabila gangguan itu berasal dari berbagai kepentingan asing sebagai dampak globalisasi dunia. Lebih lanjut berkaitan dengan ketaatan hukum dalam konstitusi menyangkut keefektifan hukum berlaku dalam masyarakat, artinya fungsi hukum dalam mengatur/memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Assiddiqi lebih lanjut menyatakan adanya nilai-nilai konstitusi ini yang berperan strategis dalam: 1) menjaga kredibilitas dan efektivitas pelbagai lembaga publik, 2) menjamin kehidupan demokrasi dan *public engagement*, dan 3) menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam rangka akuntabilitas badan-badan publik. Berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Assiddiqi memberikan contoh positif yaitu: (<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>, diakses 6 Februari 2013, pk. 13.00).

1) Nilai kemanusiaan

- a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- b) Saling mencintai sesama manusia.
- c) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d) Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

2) Nilai religius

- a) Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- b) Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

3) Nilai Produktivitas

- a) Kualitas perlindungan terhadap masyarakat dalam menuju kemakmuran.
- b) Kualitas undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Nilai Keseimbangan

- a) Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional.
- b) Tidak memaksakan kehendak, tetapi ber-emphaty.
- c) Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani.

5) Nilai Demokrasi

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat, adalah:

- a) Rasa cinta tanah air.
- b) Jiwa patriot bangsa.
- c) Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pondasi utama tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa adalah rasa cinta dan patriotisme terhadap tanah air serta hadirnya kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan faktor penting dalam membina dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa adalah:

- a) Segala derap langkah yang utama harus didasarkan pada upaya mengejar kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- b) Terpeliharanya rasa kemanusiaan dan keadilan.
- c) Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman.
- d) Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

6) Nilai Kesamaan Derajat

Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakkan HAM yang paling menonjol adalah penegakkan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidakmanusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan.

7) Nilai ketaatan Hukum.

Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

Nilai-nilai yang dikemukakan oleh Assiddiqi ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

B. Kalangan Wong Cilik

Wong Cilik secara harafiah berarti orang kecil, artinya orang yang kehidupan sosio ekonomis politisnya ditentukan pihak lain. *Wong cilik* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk membedakan status sosial dalam masyarakat Jawa yang dikontraskan dengan istilah priyayi. Suseno menyatakan bahwa golongan *wong cilik* adalah sebagian besar massa petani, petani

gurem, pekerja kasar, pedagang kecil, dan buruh tani yang umumnya menjadi lapisan masyarakat bawah. Suseno juga membedakan antara wong cilik dan orang miskin. Menurutnya, orang miskin termasuk orang kecil, sedangkan orang kecil hidupnya sederhana, tetapi belum tentu miskin. *Wong cilik* belum tentu miskin, tetapi mereka adalah kaum yang *powerless* artinya tidak mempunyai kuasa atau kaum yang lemah dan tidak berdaya sehingga mudah untuk dieksploitasi dan dimiskinkan. Jadi walaupun mereka tidak miskin tetapi mereka sangat mudah untuk dimiskinkan. Suseno menggambarannya sebagai berikut: walaupun *wong cilik* punya tanah yang cukup tetapi karena kondisi *kepowerless*-annya maka dengan mudah tanah mereka di gusur dengan paksa oleh pihak yang lebih berkuasa. Suseno mendefinisikan *wong cilik* sebagai berikut: (Suseno, Magnis. Jurnal Pelita Jama Volume 13 No.1 Tahun 1998. *Wong Cilik dan Status Sosialnya dalam Konteks Indonesia*. <http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=849&res=jpz>, diakses 10 Februari 2013, Pk. 10.00).

... mereka ini adalah "orang yang tak berdaya karena mengalami aneka macam pemiskinan... yang membuat semakin banyak orang hidup semakin tidak manusiawi dan pada umumnya mereka hidup di bawah taraf kewajaran manusiawi".

Menurut konsepsi Jawa dalam dunia wayang, *wong cilik* adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong (SGPB) yang setia mendampingi satria utama (aparatur pemerintah/penguasa termasuk birokrat) dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Semar adalah manifestasi dewa yang hidup di bumi, sehingga para satria harus mengikutinya sebab bila bersikap sembarangan bisa *kualat*. Artinya bila penguasa mengabaikan aspirasi *wong cilik*, maka kekuasaan mudah jatuh. Dengan demikian konsep *kualat* ini merupakan mekanisme kontrol agar penguasa tidak melupakan *wong cilik*.

Wong cilik berbeda dengan *cak cilik* (anak kecil) yang patuh dan diam pada penguasa, sehingga tidak berani menuntut haknya atau mengadukan permasalahannya kepada anggota dewan atau pejabat daerah. Bila terpaksa *wong cilik* menuntut haknya ke penguasa, maka jawabannya adalah aspirasi kami tampung. Sebaliknya bila *wong cilik* melanggar hukum maka penguasa menjatuhkan sanksi tegas demi tegaknya hukum. Dengan demikian dalam piramida kekuasaan, posisi *wong cilik* di bawah. Lapisan menengah yaitu golongan menengah dapat bertindak memihak kepada *wong cilik* agar derajatnya naik, namun terkadang menjadikan *wong cilik* sebagai komoditas perdagangan yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran golongan

menengah, dan kurang berkenan bila wong cilik ini kemudian terangkat menjadi golongan menengah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsepsi kebangsaan di kalangan wong cilik. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan serta menganalisis permasalahan penelitian.

B. Informan

Penelitian kualitatif terkait dengan keberadaan informan sebagai sumber informasi. Teknik pemilihan informan ini dilakukan dengan cara *purposive*, artinya siapa yang menjadi informan sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau alasan tertentu. Informan di sini terdiri atas masyarakat yang tergolong wong cilik di Kota Tangsel, dan diperkuat dengan pendapat dari para narasumber atau tokoh baik dari kalangan akademisi ataupun praktisi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (*wong cilik*) 20 orang dan para narasumber/tokoh baik dari kalangan akademisi ataupun praktisi sebanyak 10 orang. Data jenis ini berupa data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer ini secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu berupa penelusuran kepustakaan berupa dokumen-dokumen dan literatur tentang konsepsi wong cilik dan konsepsi-konsepsi kebangsaan serta dokumen atau sumber sejarah yang telah tersusun dalam arsip. Kedua sumber data kemudian digabungkan dan dilakukan analisis sistematis tentang pengaruh konsep kebangsaan bagi *wong cilik* dengan perspektif masalah sosial dan politik kekinian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam. Panduan wawancara mendalam sebelum digunakan telah diuji coba terlebih dahulu.

D. Analisis dan Interpretasi Data

Data yang sudah terkumpul digabungkan dan dilakukan analisis sistematis tentang pengaruh konsep kebangsaan bagi wong cilik dengan perspektif masalah sosial dan politik kekinian. Analisis sistematis ini akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Proses analisis data. Data dari tiap tema/variabel yang sudah disajikan dalam bentuk narasi selanjutnya dianalisis sehingga dapat ditemukan konsepsi kebangsaan di kalangan wong cilik.
2. Proses interpretasi data. Data yang sudah dianalisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan yaitu dicari maknanya
3. Proses penarikan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan atas data yang sudah selesai dianalisis dan diinterpretasikan.

HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang konsep kebangsaan yang mengacu pada proposisi tujuan penelitian yang diperoleh dari narasumber melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan para pakar. Sajian proposisi tersebut mengacu kepada tujuan penelitian yaitu bagaimana *wong cilik* mengartikan konsep kebangsaan dalam konteks keseharian mereka.

Karakteristik narasumber

FGD pertama adalah kelompok *wong cilik* latar belakang ”pengumpul sampah daur ulang” di daerah Pamulang, Tangerang Selatan dengan penghasilan rata-rata perhari Rp 50.000,-. Keseharian mereka adalah mengumpulkan, memilah dan menjual hasil kumpulan sampah daur ulang tersebut, dan sampah yang dikumpulkan adalah sampah plastik daur ulang. Mereka menyewa lahan seharga Rp 5jt/pertahun sebagai satu komunitas pengumpul sampah. Peran mereka berbeda-beda, ada pengumpul sampah yang berkeliling lingkungan sebagai pemulung, ada yang bertugas memilah² dan terakhir yang bertugas menjual sampah daur ulang ke pembeli..... Oleh karena mereka bukan warga yang berdomisili tetap, mereka rentan dijadikan obyek pungutan liar atas nama keamanan dan kenyamanan lingkungan. Bahkan, saat hari raya mereka acap kali diminta sumbangan untuk THR para aparat RT/RW dan para ’pemuda’ yang ada dilingkungan mereka kerja dan tinggal.

FGD (05/11), kelompok kedua berasal dari kalangan ibu rumah tangga yang memiliki kepedulian dalam menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal mereka. Secara struktural mereka bukan pengurus RT/RW namun mereka peduli tidak saja terhadap kebersihan lingkungan, tetapi terlibat aktif dalam kegiatan kesehatan warga sekitarnya. Bahkan, mereka aktif mencari dana untuk kegiatan-kegiatan kesehatan dilingkungan mereka. Dengan dibantu dana dari organisasi keagamaan dan melalui posyandu tersedia obat-obatan serta makanan tambahan untuk perbaikan gizi anak-anak di lingkungan mereka. Kelompok ini lebih dapat bercerita secara detail tentang konsep kebangsaan dan keterkaitannya dengan hak & kewajiban mereka yang dimanifestasikan dalam keseharian dalam mengelola sampah dilingkungan mereka. Kesadaran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan tinggi dan perbuatannya dilakukan dari hal-hal kecil tahap demi tahap. Kelompok ini juga telah percaya diri untuk mengajak warga lain bergabung dalam menjaga kebersihan lingkungan. Aparat RT/RW mendukung kegiatan mereka, dan inisiatif memang datang dari warga sendiri dalam kebersihan lingkungan.

Konsep Kebangsaan

Nasionalisme adalah konsep politik yang secara sadar difahami sebagai suatu ikatan kebersamaan yang hidup dalam suatu wilayah Negara yang berdaulat. Kita menyadari bahwa kebangsaan Indonesia dirumuskan dalam konteks ikatan kebersamaan senasib pada masa penjajahan Hindia Belanda, dan nasib kebersamaan itu dimanifestasikan dalam pernyataan politik sumpah pemuda. Namun, perumusan kebangsaan Indonesia ini dijewantahkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Memang dan hampir pasti kesadaran bangsa Indonesia dipelopori oleh kaum intelektual (elit politik atau tokoh masyarakat), namun kaum intelektual pulalah yang kerap kali menjerumuskan kebangsaan dalam kebuntuan politik (Silalahi, 2002:10). Pada masa kemerdekaan adalah kaum intelektual yang kelak memimpin bangsa ini dan menjadi elit politik yang merumuskan ideologi dan bentuk Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi. Soekarno adalah simbol dari pergeseran bangsa Indonesia menuju bangsa yang merdeka yang bercita-cita membangun demokrasi, dimana rakyat adalah kekuatan menuju cita-cita tersebut (Soekarno,..). Oleh sebab itu, pemimpin dan karakter kepemimpinan penting diidentifikasi dalam setiap pembahasan tentang konsep kebangsaan. Sedangkan rakyat yang dipesonafikasikan sebagai *wong cilik* selain sebagai persyaratan suatu negara-bangsa juga merupakan kumpulan individu-individu dalam sistem sosial-politik melalui suatu konsensus menjadi warganegara dalam suatu Negara, dan mereka adalah produk elit politik.

Dalam penelitian ini peran elit politik dalam merumuskan kebangsaan akan dibahas secara kritis. Sedangkan, rakyat atau *wong cilik* sebagai bagian sistem sosial politik kebangsaan Indonesia adalah grand politik yang oleh Harsja W. Bachtiar (1999) dikatakan terdiri dari berbagai nasion-nasion yang memiliki beragam kebudayaan. Bila tidak disemai dalam kesadaran kesatuan politik solidaritas bukan karena kekhawatiran munculnya disintegrasi bangsa dari keragaman itu tetapi lebih pada sikap apatis *wong cilik* untuk berperan sebagai warganegara. Kenapa penting menumbuhkan peran kewarganegaraan dalam konsep kebangsaan *wong cilik*? Pertama, konsep kewarganegaraan melekat pada rasa hidup bersama dalam identitas kolektif yang selanjutnya memunculkan kriteria politik hak dan kewajiban *wong cilik* sebagai warganegara. Kedua, penting dimaknai bahwa status kewarganegaraan ini terkait dengan masalah peningkatan partisipasi politik *wong cilik* (Nico T Harjanto, 2002: 87). Ketiga, peningkatan partisipasi politik berpengaruh pada entitas kehidupan politik misalnya ikut dalam pemilu (rekrutmen elit-elit politik), memperoleh layanan public (KTP, Akte dll).

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Adapun Rincian biaya penelitian sbb.

A	PELAKSANAAN	
	Gaji/Upah	
1.	Ketua Tim Peneliti (koordinator)	
	1orang x 5 kegiatan x 3 hari x Rp 300.000,-	Rp 4.500.000,-
2.	Anggota Tim Peneliti	
	1orang x 4 kegiatan x 3 hari x Rp 300.000,-	Rp 3.600.000,-
3.	Teknisi/Administrasi	
	1orang x 3 kegiatan x 1 hari x Rp 300.000,-	Rp 1.500.000,-
4.	Honorarium Narasumber (Pakar)	
	2 orang X 2 jam x Rp 1.000.000,-	Rp 2.000.000,-
	7 orang X 1 jam x Rp 500.000,-	Rp 3.500.000,-
	Subtotal	Rp 15.100.000,-
B	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 521219	
	Penginapan/Hotel @ 650.000,- x 3 mlm	Rp 1.950.000,-
C	BAHAN ABIS PAKAI (522151)	
1.	ATK (kertas HVS, Blocknote, dll)	Rp 1.500.000,-
2.	2 (dua) USB/Flash Disk 32 GB, Tinta Printer dll	Rp 2.000.000,
3.	2 (dua) Flash Disk Recorder @ Rp 700.000,-	Rp 1.400.000,
4.	Fotokopi dokumen tertulis/references	Rp 2.000.000,
5.	Souvenir 30 buah	Rp 530.000,-
6.	Konsumsi	
	• Snack @ Rp 11.000,- (30 orang/5 kegiatan)	Rp 1.650.000,-
	• Makan siang @ Rp 36.000,- (10 orang/10 kegiatan)	Rp 3.600.000,-
7	Sewa Ruang untuk pertemuan @ Rp 600.000,-/jam	
	• Sosialisasi/konsultasi	Rp 600.000,
	• Rapat koordinator/evaluasi	Rp 1.200.000,
8	LAPORAN: Sewa komputer 2 buah x 350jam x Rp 7.500,-	Rp 5.250.000,-
	• Pengolahan (transkrip dan analisa) data	
	• Penulisan draf laporan dan perbaikan	
	• Editing dan finalisasi laporan akhir	
9	PENGGANDAAN LAPORAN	

	• Penggandaan laporan akhir, 25 exp, 100 halaman@ Rp 150,-	Rp 562.500,-
	Subtotal	Rp 20.295.000,-
D.	BELANJA PERJALANAN	
1.	Transportasi	
	Pondok Cabe-Tangerang	Rp 2.640.000,-
	3 orang x 4 lokasi x Rp 220.000,-	
	Lokal kota TangSel	
	25 informan x Rp 110.000,-	Rp 2.750.000,-
2.	Perhari	
	2 peneliti x 2hr x 4 lokasi x Rp 300.000,-	Rp 4.800.000,-
	1 tenaga administrasi x 2hr x 4 lokasi x Rp 300.000,-	Rp 2.400.000,-
	Subtotal	Rp 12.590.000,-
	JUMLAH KESELURUHAN	
A	PELAKSANAAN (Honor output kegiatan) 521213	Rp 15.100.000,-
B	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (521219)	Rp 1.950.000,-
C	BAHAN ABIS PAKAI (522151)	Rp 20.295.000,-
D	BELANJA PERJALANAN (524119)	Rp 12.950.000,-
	TOTAL	Rp 49.935.000,-
	ANGGARAN YANG DISETUJUI	Rp 50.000,000,-
	(Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	

DAFTAR PUSTAKA

Lay, Cornelius. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, No 2 (2006): Nasionalisme dan Negara Bangsa. UGM Yogyakarta dalam <http://jurnalsopol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/261> diakses tanggal 9 Maret 2013 pk.15.30.

Suseno, Magnis. Jurnal Pelita Jama Volume 13 No.1 Tahun 1998. Wong Cilik dan Status Sosialnya dalam Konteks Indonesia. Dalam <http://alkitab.sabda.org/resource.php?topic=849&res=jpz>, diakses 10 Februari 2013, Pk. 10.00.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/261/konsepsi-nilai-demokratis-kebersamaan-dan-ketaatan-hukum-dalam-meningkatkan-pemahaman-nilainilai-konstitusi>, diakses 6 Februari 2013, pk. 13.00)

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/peran-warga-negara-sebagai-bangsa-indonesia>, diakses 10 Februari 2013, Pk. 12.

Kompas, 20 Februari 2013.

Lampiran 1 : JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Anggaran untuk pelaksanaan, anggaran ini diajukan untuk keperluan berikut :

- Upah untuk tim penelitian dalam penyusunan mulai dari pembuatan desain riset hingga penulisan laporan akhir;
- Upah penanggungjawab penelitian dalam mengkoordinasikan jalannya penelitian (terutama dengan pihak pimpinan fakultas);
- Upah tenaga teknis yang membantu pekerjaan teknis dan administrasi keuangan;
- Upah narasumber pada saat wawancara/pengumpulan data dan informasi.

2. Anggaran untuk peralatan dan bahan habis pakai yang diajukan untuk keperluan sebagai berikut:

- Pembelian alat utama handycamera dan kamera foto dalam pengumpulan data dan mengabadikan peristiwa2 pada saat dilapangan;
- Pembelian recording flashdisk untuk merekam hasil wawancara.
- pembelian bahan-bahan penunjang penelitian yaitu film foto, kaset rekaman, disket, kertas, pita printer, alat tulis lainnya, serta pembelian buku dan penggandaan bahan acuan lain.

3. Anggaran untuk perjalanan

- Anggaran ini diajukan untuk melakukan wawancara dengan para informan;
- Anggaran untuk pengumpulan data dan informasi di beberapa perpustakaan;
- Anggaran transport para informan saat diskusi kelompok.

4. Anggaran untuk pertemuan.

- Anggaran ini diajukan untuk berbagai pertemuan dan diskusi kelompok tim peneliti;
- Anggaran diajukan rapat dengan para pemimpin dilingkungan perguruan tinggi peneliti.

5. Anggaran untuk laporan.

- Anggaran ini diajukan untuk pengolahan dan analisa data, penyusunan, dan penggandaan serta penjilidan laporan hasil penelitian .

6. Anggaran lain-lain.

- Anggaran ini diajukan untuk keperluan surat-menyurat, telepon, faks, perijinan, pengiriman berkas-berkas penelitian pada instansi terkait, rapat, diskusi, presentasi di depan subyek penelitian, dan urusan-urusan administrasi lain.

Lampiran 2 DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA

Beberapa sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Komputer yang online dengan internet (disediakan oleh Universitas Terbuka/UT)
2. Perpustakaan untuk mengumpulkan referensi/literature pendukung.
3. Ruang rapat untuk kegiatan koordinasi.
4. Ruang untuk merekam wawancara mendalam dengan narasumber (pakar), karena materi wawancara untuk pengayaan materi bahan ajar pada program studi Ilmu Pemerintahan.
5. ATK dan seminar kit yang diperlukan pada waktu seminar disediakan oleh UT

Lampiran 3

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI

NO	NAMA/NIDN	INSTITUSI ASAL	BIDANG ILMU	ALOKASI WAKTU	TUGAS
1	Susanti, Dra. M. Si/ 0014126704	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinir kegiatan perencanaan penelitian• Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan penelitian• Mengkoordinir kegiatan evaluasi• Mengkoordinir finalisasi laporan penelitian
2	Mani Festati Broto, Dra, M Ed/0023026002	Universitas Terbuka	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2jam/minggu	<ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan kegiatan perencanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penelitian• Melaksanakan kegiatan evaluasi• Melaksanakan finalisasi laporan penelitian

Lampiran 4

BIODATA KETUA TIM PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dra. Susanti, M.Si.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19671214 199303 2 002
5	NIDN	0014126704
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 14 Desember 1967
7	E-mail	susanti@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-74909941 ext.1927 / 021-7434391
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Sistem Politik Indonesia
		1. Teori Politik
		2. Metodologi Ilmu Pemerintahan
		3. Manajemen Konflik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	
Tahun Masuk-Lulus	1986-1991	2000-2003	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Implementasi Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta tentang Penghapusan Becak	Konflik Politik tentang Pilkada Banjarnegara 2000-2005	
Nama Pembimbing/Promotor	Prof.Drs. Abdul Kahar Badjuri	Prof.Dr. Maswadi Rauf,M.A.	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Meningkatkan Partisipasi Tutorial <i>Online</i> Bagi Mahasiswa Pasif Program Pascasarjana Universitas Terbuka melalui <i>sms reminder</i>	UT	30.000.000
2.	2010	Kajian Kesesuaian Substansi BMP MAPU 5103 Metodologi Penelitian Administrasi dengan Kompetensi Administrasi Publik	UT	30.000.000
3.	2009	Kajian Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat di Desa Jabon Mekar, Parung - Kabupaten Bogor	UT	30.000.000
4.	2009	Pemetaan Substansi TAPM berdasarkan Bidang Keilmuan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka (Studi Kasus pada Program MAP)	UT	30.000.000
5.	2008	Pola Pikir Mahasiswa dalam Menerapkan Konsep dan Teori Matakuliah MAPU 5102 Teori dan Isu Pembangunan untuk Menganalisa Permasalahan Administrasi Publik	UT	30.000.000

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Pelatihan Administrasi Keuangan Daerah bagi Aparat Desa Pondok Cabe Udik Kota Tangsel	UT	
2.	2012	Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa bagi Aparat	UT	

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
		Desa di Desa Jonggol, Kab. Bogor		
3.	2011	Monitoring Bansos Pengelolaan Sampah UT ke Pemda Tangsel	UT	
4.	2011	Monitoring Penghijauan UT di Situ Gintung	UT	
5.	2010	Pelatihan Komunikasi Efektif di Kab. Cilegon	UT	
3.	2008	Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula	SMAN 1 Sukaresmi Kab. Cianjur	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
	-		

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penyelenggara
1	2012	Anatomi Konflik di Indonesia	Semnas FISIP UT
2	2012	Kendala Radikalisme dalam Mewujudkan <i>Civil Society</i> di Indonesia	Semnas FISIP UT
3	2012	Kajian Partisipasi Peran Badan Perwakilan Desa dalam Pengambilan Keputusan	IAPA - Unbraw
4	2011	Pergeseran Pola Pikir Seorang Birokrat menjadi Akademisi: Sebuah Analisis Isi TAPM Program Magister Administrasi Publik UT	PPs UT

5.	2011	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Tutorial Online Mahasiswa MAP PPs-UT	ICDE Annual Conference
6	2008	Kontribusi Pendidikan Jarak Jauh dalam Meningkatkan Kualitas <i>Gender</i> pada Program Pascasarjana UT	Seminar Nasional PJJ-APPJI

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-			

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI	2006

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangsel, 8 Maret 2013

Pengusul

(Dra. Susanti,M.Si).

BIODATA ANGGOTA TIM PENELITIAN

B. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dra. Mani Festati Broto, M Ed
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP	19600223 198603 2 001
5	NIDN	00230260002
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Banjarmasin, 23 Februari 1960
7	E-mail	mani@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/Faks	021-7490941/021-7434391
9	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 ≥ 1000 orang
10	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Politik
		1. Sistem Keadilan dan Pemilu
		2. Kekuatan Sosial Politik Indonesia
		3. Komunikasi Politik

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Simon Fraser University, Vancouver, Canada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Politik	Distance Education Manajement	
Tahun Masuk-Lulus	1978-1985	1986-1988	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Faktor2 Eksternal yang mempengaruhi isolasi sosialisme Burma	<i>Peer Interaction: Case study UT's student</i>	
Nama Pembimbing/Promotor	<ul style="list-style-type: none">• Prof Dr Burhan Magenda• Prof.Dr. Maswadi Rauf,M.A.	Thomas O'Shea, Ph D	

K. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2009	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media Televisi, Laporan Hasil Penelitian Hibah Penelitian Strategis Nasional	UT	100.000.000
2.	2008	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR): Studi tentang filantropi pada Perusahaan Media Massa	UT	30.000.000

- Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber

L. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2012	Manajemen Dokumentasi Pemerintahan Desa, Desa Pondok Cabe Ilir	UT	
2.	2011	Penghijauan di Situ Gitung dan monitoring bantuan sosial pengolahan sampah	UT	
3.	2010	Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media TV pada anak2 Sekolah Dasar di SD Babakan, Ciputat	UT	

M. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Waktu dan Tempat
1	Open and Distance Higher Education and Rights Of The Diffable	Jurnal PTJJ, Volume 10, No.2	Tangerang Selatan, September 2009

N. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul	Penyelenggara
1.	2011	<i>Distance Education Accelerates The Construction of Civil Society,</i>	Poster pada 24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt 2011
2.	2011	<i>ASEAN Community</i>	24 th ICDE World Conference on Open and Distance Learning, Bali 2-5 Okt
3.	2010	<i>Citizen Journalism: Jejaringan Sosial untuk penguatan Civil Society,</i>	Seminar Nasional FISIP tentang <i>Citizen Journalism</i> dan Keterbukaan Informasi Publik untuk Semua, Pondok Cabe, 11 November 2010.
4.	2010	<i>Enhancing Distance Education Student's Interaction through Online Learning,</i>	Seminar on Integrating Technology Into Education, Jakarta, 17-18 May 2010.

O. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-			

P. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	-			

Q. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-			

R. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Judul Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI	2006

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Fundamental.

Tangsel, 8 Maret 2013

Pengusul,

(Dra. Mani Festati Broto,M.Ed.)

Lampiran 5

SURAT PERNYATAAN PENELITI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITIAN/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susanti, M.Si.

NIDN : 0014126704

Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:
KONSEP KEBANGSAAN DI KALANGAN WONG CHAIK yang diusulkan dalam
skema Penelitian Fundamental untuk tahun anggaran 2013 bersifat original dan
belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas-negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengesahni,
Ketua Lembaga Penelitian,

Tangerang Selatan, 8 Maret 2013

Yang Menyatakan,



(Dra. Susanti, M.Si.)
NIP. 19610724 198710 2 001



(Dra. Susanti, M.Si.)
NIP. 19671214 199303 2 002

PANDUAN WAWANCARA
KONSEPSI KEBANGSAAN DI KALANGAN WONG CILIK
(FGD dengan Wong Cilik)

Pengantar Wawancara

Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr. berikan tidak ada yang benar atau salah, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman kebangsaan di kalangan wong cilik.

Pertanyaan :

1. Jelaskan apa yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui tentang pengertian kebangsaan!
2. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak/Ibu/Sdr!
3. Sebutkan keterlibatan Bapak/Ibu/Sdr pada kegiatan di lingkungan Bapak/Ibu/Sdr (tempat tinggal, tempat kerja)!
4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr dengan terjadinya banyak konflik, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr!
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang gaya kepemimpinan para elit dikaitkan dengan pengertian kebangsaan (elit desa, elit politik, elit nasional)!

Terimakasih.

PANDUAN WAWANCARA
KONSEPSI KEBANGSAAN DI KALANGAN WONG CILIK

Untuk Narasumber

Pengantar Wawancara

Jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr. berikan tidak ada yang benar atau salah, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman kebangsaan di kalangan wong cilik.

Pertanyaan :

1. Jelaskan apa yang Bapak/Ibu/Sdr ketahui tentang pengertian kebangsaan!
2. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di kalangan Wong Cilik dan Elit!
3. Jelaskan keterlibatan Wong Cilik dan Elit pada kegiatan sehari-hari!
4. Menurut Bapak/Ibu/Sdr dengan terjadinya banyak konflik, Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr!
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Sdr tentang gaya kepemimpinan para elit dikaitkan dengan pengertian kebangsaan (elit desa, elit politik, elit nasional)!

Terimakasih.

